

POSISI STRATEGIS PENDIDIKAN TINGGI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Agustuti Handayani

Staf Pengajar FISIP Universitas Bandar Lampung

Email: moeda.tuti@gmail.com

Abstract

Theory development in the past embraces the principle that poverty occurs because of a lack of ability to save and build physical capital. However, the theory was later corrected by another theory which states that "quality" as the ability of resident physical and psychological-intellectual, is more important than physical capital in the development process. The theory asserts that human resources (HR) is the most decisive factor of the character and pace of social and economic development of a nation. Thus, an increase in resident enrollment to pursue higher education should be a strategic agenda for a nation to rise up to pursue economic progress.

Key Words: *human resources, education, economic progress*

A. Pendahuluan

Pendidikan menempati posisi strategis dalam pembangunan ekonomi ketika sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dipandang sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan. Teori pembangunan di masa lampau menganut prinsip bahwa kemiskinan terjadi karena kurangnya kesanggupan untuk menabung dan membangun modal fisik. Namun, mengutip hasil penelitian Theodore W. Schultz, Tambunan (2004) kemudian membuktikan bahwa "mutu" penduduk yaitu kemampuan fisik maupun psikis-intelektual, justru lebih penting dibandingkan modal fisik dalam proses pembangunan. Begitu pula, dengan merujuk pada pendapat Michael Todaro (1997), Wicaksono (2004) menyatakan sebagian besar ekonom sepakat bahwa sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa bersangkutan. Atas dasar pandangan ini, negara-negara maju berinisiatif

mendahulukan investasi *human capital* di bidang kesehatan dan pendidikan. Pandangan ini dipertegas Amartya Sen (pemenang Nobel Ekonomi tahun 1998) dalam buku *Inequality Reexamined* (1992) yang menekankan pentingnya kesempatan (*entitlement*) karena penyediaan lembaga pendidikan dan sekolah saja tidak cukup jika tidak sekaligus diciptakan kerangka institusional, yang memungkinkan kaum termiskin untuk bisa masuk ke lembaga itu dan memanfaatkannya guna memerangi kemiskinan.

Masalah pendidikan menjadi kian penting dan strategis karena bisa dijadikan fundamen sosial guna mendorong proses transformasi masyarakat. Pendidikan berkaitan langsung dengan isu-isu krusial seperti kemiskinan, kesejahteraan, kesehatan, kohesi sosial, dan demokrasi. Dalam perspektif demikian, pendidikan berdimensi ganda: secara ekonomi dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan. Sedangkan

secara sosial, pendidikan menjadi jalan untuk memperkuat kohesi masyarakat dan membuka wawasan demokrasi. Jadi pendidikan merupakan mata rantai yang menghubungkan sejumlah persoalan sosial ekonomi.

Menurut Bank Dunia (1999), beberapa argumen dapat dikemukakan untuk mendukung pandangan ini. *Pertama*, pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan, kemam-puan, dan ketrampilan seseorang, sehingga ia menjadi lebih produktif dan karena itu dapat meningkatkan penghasilan secara memadai untuk kemudian mendorong peningkatan kesejahteraan. Dalam pengertian ini, pendidikan merupakan bentuk investasi di bidang SDM-human capital development. *Kedua*, sejalan dengan peningkatan penghasilan dan perbaikan kesejahteraan, maka akan berpengaruh pula terhadap peningkatan derajat kesehatan dan gizi (nutrisi). *Ketiga*, meningkatkan mutu dan standar hidup, sebab pendidikan membuat individu dan masyarakat lebih terpelajar sehingga secara sosial menjadi lebih kuat. *Keempat*, mendorong proses pembangunan sosial melalui penguatan kohesi dalam masyarakat, membuka berbagai peluang dan kesempatan yang lebih baik. Pendidikan yang bertemali dengan ekonomi dan sosial akan mendorong akselerasi pembangunan dan pertumbuhan secara mikro.

Pendidikan memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi melalui dua cara. *Pertama*, pendidikan menciptakan pengetahuan baru yang membawa pengaruh terhadap proses produksi. Pendekatan ini lazim disebut *schumpeterian growth* yang mengandaikan, pertumbuhan ekonomi itu didorong akumulasi modal manusia. Modal manusia, yang diperankan kaum profesional, para ahli, teknisi, dan pekerja, merupakan penggerak utama kemajuan ekonomi. *Kedua*, pendidikan menjadi medium bagi proses difusi dan transmisi

pengetahuan, teknologi, dan informasi yang dapat mengubah cara berpikir, cara bertindak, dan kultur bekerja. Unsur pengetahuan, teknologi, dan informasi merupakan kekuatan transformatif yang dapat memacu akselerasi pembangunan ekonomi (Alhumami, 2004).

Memasuki era global yang ditandai menguatnya ekonomi neoliberal, keunggulan ilmu pengetahuan menjadi faktor determinan dalam mendorong percepatan kemajuan suatu bangsa. Dinamika perkembangan ekonomi yang digerakkan ilmu pengetahuan itu secara teknis disebut *knowledge-driven economic growth*. Konsep *knowledge-driven economic growth* tersebut menempatkan lembaga pendidikan tinggi pada posisi amat penting dan strategis sebab dapat : (1) melahirkan tenaga-tenaga kerja terlatih, kompetitif, dan adaptif seperti profesional, pakar, teknisi, dan manajer; (2) melahirkan ilmu pengetahuan baru dan menciptakan inovasi teknologi; dan (3) meningkatkan kemampuan mengakses perkembangan ilmu pengetahuan pada level global dan mengadaptasinya menurut konteks lokal.

Karena itu sejak tahun 1990, Bank Dunia lewat *Annual World Development Report*-nya menekankan urgensi "pembangunan manusia". Demikian pula setiap tahunnya UNDP melalui *Human Development Report*-nya juga menekankan pentingnya perkembangan dan penggunaan kemampuan-kemampuan manusiawi sebagai soko guru pembangunan. Dalam konteks ini, penanaman modal manusia dalam bidang pendidikan menjadi semakin penting sebagai prasyarat untuk memberdayakan manusia agar berjaya dalam memerangi kemiskinan. Hal yang sama ditegaskan lagi dalam "Inisiatif 20:20" di Kopenhagen pada tahun 1995, yang mewajibkan semua negara kaya dan berkembang menggunakan 20 % bantuan pembangunan atau anggaran belanjanya

untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

B. Realitas di Indonesia

Strategi pembangunan Indonesia bergerak sejalan minat politik rezim yang berkuasa. Di masa presiden Soekarno, politik adalah panglima sehingga masalah pendidikan terabaikan. Pergeseran pemikiran terjadi ketika kekuasaan beralih ke tangan presiden Soeharto. Rezim Orde Baru di bawah presiden Soeharto percaya bahwa ekonomi adalah panglima. Pemerintahan baru ini meyakini bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi akan menghasilkan *trickle down effects* yang akan meneteskan hasil pembangunan kepada rakyat miskin. Harus diakui bahwa strategi pembangunan rezim Orde Baru telah membawa stabilitas politik dan ekonomi selama tiga dasawarsa. Dalam kenyataannya stabilitas politik dan ekonomi terbukti tak langgeng karena modal utama pembangunan, yaitu manusia, terabaikan. Kondisi itu berlanjut hingga kini karena Indonesia kurang memiliki modal manusia berkualitas yang diperlukan guna menopang pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang amat buruk ini membuat sepertiga atau separuh penduduk Indonesia masih rentan terhadap masalah kemiskinan.

Pembangunan pendidikan di Indonesia semakin relevan untuk diprioritaskan mengingat pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara lain, bahkan di kawasan Asia Tenggara sekalipun. Ketertinggalan pembangunan pendidikan di Indonesia itu tercermin dalam Laporan UNDP mengenai *Human Development Index* (1999) yang menempatkan Indonesia pada urutan ke-105. Urutan ini jauh di bawah Singapura dan Brunei Darussalam, masing-masing pada posisi ke-22 dan ke-25; sementara Malaysia (56), Thailand (67), dan Filipina (77), bahkan Sri Lanka saja pada posisi ke-90. Selain aspek

pendidikan, indikator dalam menentukan indeks pemba-ngunan manusia adalah aspek kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Salah satu jenjang pendidikan yang berpotensi memberi kontribusi besar pada kemajuan ekonomi adalah jenjang pendidikan tinggi. Untuk itu, peran Perguruan Tinggi perlu ditingkatkan secara maksimal agar dapat menjadi kekuatan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sayangnya struktur tenaga kerja di Indonesia kini justru lebih banyak didominasi orang-orang berpendidikan rendah. Mengutip Data tahun 2000, Alhumami (2004) menyatakan bahwa komposisi angkatan kerja yang mengenyam pendidikan tingkat sekolah dasar ke bawah mencapai 59 %, angkatan kerja lulusan SLTP mencapai 16,06 % dan angkatan kerja lulusan SLTA mencapai 19,44 %. Sementara itu angkatan kerja berpendidikan tinggi berjumlah sangat sedikit, yakni 4,6 %. Data itu menggambarkan betapa mayoritas tenaga kerja Indonesia justru mempunyai keahlian dan keterampilan tinggi yang diperlukan sektor swasta (bisnis dan industri).

Mencermati rendahnya tingkat pendidikan mayoritas angkatan kerja Indonesia, upaya membangun pendidikan bermutu memang harus dimulai dari pendidikan dasar (*basic education*). Ada dua alasan yang mendasarinya: *pertama*, pendidikan dasar akan melahirkan dan meningkatkan jumlah penduduk yang 'melek huruf'. Selain itu, komposisi penduduk pada kelompok umur sekolah dasar jauh lebih besar dibanding umur sekolah menengah, apalagi perguruan tinggi. Tentu saja mereka memerlukan pelayanan pendidikan. *Kedua*, pendidikan dasar merupakan kerangka landasan bagi pendidikan lanjutan. Pendidikan dasar memberi sumbangan yang amat besar bahkan menentukan dalam menyiapkan tiap individu untuk dapat mengem-

bangkan segenap potensi dan kemampuan mereka guna mengikuti pendidikan pada jenjang selanjutnya.

Pemerintah sejak tahun 1994 telah melaksanakan kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Kebijakan ini diambil setelah melihat bahwa lebih dari 80 % tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan SD, tidak tamat SD, dan sebagian buta huruf sehingga jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, pendidikan tenaga kerja di Indonesia jauh lebih rendah. Namun menurut Bank Dunia (1998), kualitas pendidikan dasar Indonesia masih relatif rendah karena menghadapi sejumlah masalah, yang dapat dikelompokkan dalam dua katagori: fisik dan non fisik. Pada katagori fisik, masih dijumpai keterbatasan sarana dan prasarana seperti gedung dan fasilitas pendukung lain seperti perpustakaan, laboratorium, peralatan, dan buku pelajaran. Pada kategori non fisik, masalah yang dihadapi adalah guru-guru yang tak memenuhi standar kualifikasi dan kurang terlatih; kurikulum yang *overloaded* bahkan tak terintegrasi dengan bidang studi, materi pelajaran, pelatihan guru, dan sistem penilaian; serta manajemen pendidikan yang *complicated* sehingga tak efisien.

Di pihak masyarakat, khususnya masyarakat miskin, tingginya beban biaya pendidikan menyebabkan masyarakat tidak mampu membayar segala biaya pendidikan. Sekretariat Kelompok Kerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan BAPPENAS-Komite Penanggulangan Kemiskinan (2004:53), mengungkapkan bahwa bagi masyarakat berpendapatan rendah, biaya pendidikan menempati porsi yang besar untuk pengeluaran rumah tangga dengan prosentase per anak sebesar 10 % untuk tingkat SD, 18,5 % untuk tingkat SLTP, dan 28,4 % untuk SLTA. Kebijakan wajib belajar sesungguhnya telah membebaskan masyarakat dari biaya SPP. Namun pemerintah mengizinkan pihak

sekolah untuk menarik berbagai pungutan seperti uang BP3, bangunan, seragam, Pramuka, buku, laboratorium, komputer, dan ulangan umum bersama. Tingginya beban biaya ini menyebabkan masyarakat memilih tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan atau keluar pada jenjang pendidikan tertentu.

Di pihak lain, dana yang dialokasikan untuk pendidikan masih jauh dari yang diharapkan. Laporan BPS-BAPPENAS-UNDP (2004:3) mengungkap bahwa pengeluaran tahunan untuk pendidikan di Indonesia pada tahun 2004 sebesar Rp 33,0 triliun dari total dana yang dibutuhkan sebesar Rp 58,0 triliun di mana sebagian besar (83,4 %) dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai. Jika dibandingkan ratusan trilyun uang negara yang dikeluarkan untuk membayar bunga dan cicilan utang luar negeri, merekapitulasi bank-bank bermasalah, membeli peralatan militer dari luar negeri, sesungguhnya pemerintah memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikan dasar. Hal ini memunculkan kesan bahwa pemerintah belum tergerak untuk menjadikan pembangunan manusia sebagai proyek prioritas.

Selama ini lembaga-lembaga sosial-keagamaan sudah cukup terlibat dalam membantu pemerintah menyelenggarakan pendidikan. Yang masih kurang dioptimalkan adalah peran kalangan bisnis yang amat potensial membantu pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan dana pendidikan dengan cara melakukan investasi kemanusiaan melalui pengembangan sejenis program *community development* (pengembangan masyarakat), di mana perusahaan memberi hibah dari sebagian keuntungannya untuk dipakai masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan studi yang dilakukan Psacharopoulos (1972) mengenai pembiayaan pendidikan, ditemukan fakta

bahwa di Negara Sedang Berkembang (NSB), rata-rata biaya seorang mahasiswa setara dengan 88 kali biaya seorang siswa SD. Kenyataan ini berbeda dengan di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia Baru yang perbandingannya mencapai 17,6. Dengan studi yang sama, ditemukan fakta bahwa pendapatan seorang pekerja lulusan sarjana adalah sekitar 6,4 kali pendapatan pekerja lulusan SD. Tingginya biaya pendidikan tinggi di NSB yang tidak diikuti secara proporsional dengan pendapatan lulusan perguruan tinggi mengindikasikan telah terjadinya misalokasi sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi (Wicaksono, 2004). Kondisi Indonesia tahun 2003 tidak sekontras itu. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik pada tahun 2003 menunjukkan bahwa seorang pekerja lulusan Perguruan Tinggi memiliki pendapatan tiga kali lipat dibanding lulusan Sekolah Dasar. Sementara itu biaya bagi seorang mahasiswa mencapai 11 kali dibanding biaya yang dikeluarkan seorang siswa Sekolah Dasar (BPS, 2003). Mengutip pendapat Todaro (1997), Wicaksono (2004) mengungkap kecenderungan lain yang muncul di NSB, termasuk di Indonesia, adalah pandangan masyarakat yang menilai pendidikan lebih sebagai status sosial ketimbang produktivitas. Masyarakat, termasuk pasar tenaga kerja, cenderung mengharapakan ijazah pendidikan lebih tinggi. Kecenderungan ini yang mendorong meningkatnya permintaan akan jenjang pendidikan tinggi.

Dalam kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia, harus dipahami bahwa biaya yang dialokasikan ke sektor pendidikan tidak lain adalah sebuah investasi yang harus diharapkan memberikan akan manfaat di kemudian hari. Dengan kata lain, subsidi pendidikan kepada seorang siswa (mahasiswa) semestinya memberikan

manfaat sosial berupa nilai positif untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Selain manfaat sosial, pendidikan juga memberi manfaat individu (*private benefit*) melalui pendapatan atau akses kepada pekerjaan yang layak. Dalam ekonomi pendidikan, kedua manfaat itu selalu dijadikan tolok ukur tentang pengaruh pendidikan terhadap nilai ekonomis, termasuk pembangunan ekonomi.

Studi yang dilakukan Psacharopoulos dan Patrinos (2002) menemukan, investasi pendidikan tinggi di Indonesia tahun 1986 memiliki nilai manfaat sosial sebesar 5 %. Nilai ini lebih rendah ketimbang manfaat sosial dari pendidikan menengah yang mencapai 11 % (Wicaksono, 2004). Dengan mengacu kepada data Susenas BPS 2003, Wicaksono (2004) menyimpulkan bahwa untuk tahun 2003, nilai manfaat sosial untuk pendidikan tinggi adalah sebesar 5,46 % dan nilai manfaat individu adalah sebesar 18,2 %. Perlu dicatat, kedua manfaat itu dibandingkan terhadap sekolah menengah. Dari studi terbaru terlihat, nilai manfaat sosial pendidikan tinggi cenderung meningkat, meski dengan pertumbuhan relatif lambat, yaitu sebesar 0,46 %. Secara teoretis ada dua hal yang dapat diinterpretasikan dari peningkatan nilai manfaat ini. *Pertama*, peningkatan nilai manfaat disebabkan penawaran pendidikan tinggi (*supply of higher education*) masih belum mencapai titik jenuh, sehingga setiap unit peningkatan penawaran masih memberi *return* yang positif (belum mencapai *excess supply*). *Kedua*, terjadinya perubahan struktur ekonomi dan tenaga kerja di mana permintaan akan tenaga kerja lulusan PT kian besar yang mendorong lulusan kelompok ini menerima tingkat upah di atas tingkat upah yang kompetitif. Tingkat upah yang tinggi tentu akan memperbesar sumbangan pada negara melalui pajak dan ini mendorong meningkatnya manfaat sosial (Wicaksono, 2004).

C. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kajian di atas, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang paling berpotensi memberikan kontribusi besar atas kemajuan ekonomi. Masyarakat, khususnya masyarakat miskin, menaruh harapan terhadap peran pendidikan tinggi dalam meningkatkan taraf hidup. Melihat kecilnya angka partisipasi masyarakat di jenjang pendidikan tinggi, dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian kecil saja warga masyarakat yang mampu meningkatkan taraf hidup. Untuk itu peningkatan angka partisipasi pada jenjang pendidikan tinggi merupakan langkah yang paling tepat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Upaya ini amat strategis mengingat tingkat permintaan masyarakat maupun pasar tenaga kerja akan institusi pendidikan tinggi dalam waktu ke depan memang masih cukup tinggi.

Peningkatan angka partisipasi pada jenjang pendidikan tinggi mensyaratkan perubahan yang lebih besar pada komposisi kelompok penduduk usia sekolah menengah. Persoalannya daya beli masyarakat atas pelayanan pendidikan ternyata masih lemah. Di lain pihak sarana prasarana, anggaran, maupun proses pembelajaran bermutu yang disediakan pemerintah masih jauh dari memadai. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan harus dibarengi upaya peningkatan daya beli masyarakat.

Sejumlah alternatif dapat direkomendasikan menjadi kebijakan. *Pertama*, menjadikan paradigma pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai arus utama. Paradigma ini sesungguhnya telah dianut pemerintah dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1993. Namun krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia sejak 1998 menjadikan perhatian pemerintah atas pengembangan sumber daya manusia

menjadi berkurang. Indikasinya, anggaran pendidikan hanya dialokasikan Rp 33,0 trilyun sementara ratusan trilyun lainnya justru dikeluarkan untuk membayar bunga dan cicilan utang luar negeri, merekapitulasi bank-bank bermasalah, dan membeli peralatan militer dari luar negeri. Pemerintah agaknya memandang bahwa masalah pendidikan akan membaik seiring dengan membaiknya ekonomi, padahal pengalaman Malaysia dan Vietnam menunjukkan bahwa justru masalah pendidikan itulah yang harus terlebih dahulu diperbaiki jika ingin memperbaiki masalah ekonomi. Karena itu peningkatan anggaran pendidikan bukan mustahil untuk dilakukan, lebih-lebih konstitusi memang telah mengamanatkannya.

Kedua, perbaiki sistem rekrutmen tenaga pengajar yang berbasis kompetensi. Rekrutmen tenaga pengajar harus transparan dan melibatkan lembaga independen. Tenaga pengajar harus direkrut berdasar standar kompetensi yang jelas. Perbaikan dilakukan dengan merubah model seleksi dari yang semula menekankan kecakapan umum menjadi model seleksi yang lebih menekankan kemampuan calon tenaga pengajar dalam melakukan strategi pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Langkah ini memang menjadikan jumlah calon tenaga pengajar yang terseleksi menjadi lebih sedikit, namun kualitasnya akan lebih meningkat. Seiring dengan perbaikan tingkat kesejahteraan tenaga pengajar, profesi ini akan makin diminati dan diperhitungkan.

Ketiga, mengakhiri dikhotomi lembaga pendidikan negeri dan swasta. Selama ini lembaga pendidikan negeri menempati kelas satu, sementara lembaga pendidikan swasta menempati kelas dua, padahal tidak semua kebutuhan pendidikan bisa dipenuhi hanya oleh lembaga pendidikan negeri.

Untuk itu alokasi bantuan (dana, sarana, tenaga, pelatihan, manajemen, dll) atas lembaga pendidikan swasta tak hanya diterapkan atas lembaga pendidikan swasta yang telah maju, melainkan justru harus diprioritaskan pada lembaga pendidikan swasta yang masih tertinggal. Di samping itu berbagai kebijakan yang memarjinalkan lembaga pendidikan swasta, seperti diizinkannya lembaga pendidikan tinggi negeri membuka program S-1 ekstensi, harus segera ditinggalkan.

Keempat, penentuan standar minimum kualitas pelayanan pendidikan yang bersifat nasional, dengan mengakomodasi variasi potensi antar daerah. Standar minimum ini juga mencakup aspek input (kurikulum, sistem penilaian, sistem manajemen, sarana dan prasarana pendidikan), aspek proses (penerapan prinsip *participatory*, non-diskriminasi, dan metode interaksi dua arah dalam pembelajaran). Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi sekaligus memberi jaminan pelayanan bagi masyarakat.

Kelima, Menjaga stabilitas makro-ekonomi. Pada tingkat makro harus diupayakan agar tingkat inflasi tetap rendah, nilai mata uang stabil, dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Investasi ekonomi harus diarahkan ke sektor riil yang menyerap banyak tenaga kerja. Efisien anggaran harus makin meningkat seiring dengan meningkatnya pemberantasan korupsi. Sementara itu pengeluaran pemerintah harus diarahkan untuk memperkuat peran sektor usaha kecil, mikro, dan menengah dalam perekonomian nasional. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat daya beli masyarakat atas jasa pelayanan pendidikan, disamping untuk mengurangi tingkat pengangguran akibat banyaknya angka putus sekolah.

Keenam, mengintegrasikan pendidikan non formal dengan pendidikan formal. Selama ini lembaga pendidikan

non formal kurang diperhitungkan dalam kebijakan pendidikan, padahal jenis pendidikan ini menyediakan kecakapan yang langsung dapat diterapkan di dunia kerja. Integrasi lembaga pendidikan non formal dengan pendidikan formal dapat ditempuh dengan mendesentralisasikan pengelolaan kegiatan *life skill* kepada lembaga pendidikan non formal. Kebijakan ini disamping memberikan ruang bagi lembaga pendidikan non formal, juga dimaksudkan agar lembaga pendidikan formal bisa terfokus kepada upaya membentuk kecakapan akademis para peserta didik. Demikian pula untuk memacu peningkatan kualitas, Pemberian insentif berupa bantuan (dana, prasarana, tenaga, pelatihan, konsultasi manajemen, dll) tak hanya diberikan ke lembaga pendidikan formal, tetapi juga ke lembaga pendidikan non formal.

Ketujuh, mendorong perusahaan untuk melakukan program *community development*. Dalam program ini, perusahaan memberi hibah dari sebagian keuntungannya untuk dipakai menyediakan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu. Sebagai imbalannya, pemerintah bisa memberikan keringanan pajak ataupun kemudahan lainnya. Di tengah proses *recovery* ekonomi seperti sekarang ini, langkah ini di samping membantu kebangkitan perusahaan swasta, juga merupakan langkah strategis bagi tersedianya SDM dengan kualitas yang lebih meningkat di masa datang.

Kedelapan, mengembangkan strategi baru peningkatan mutu Perguruan Tinggi. Ada enam strategi: (1) membuat program bantuan manajemen dan teknis yang berbasis di kampus guna menyemai potensi bisnis dan kewirausahaan; (2) membuat program guna memantapkan dan mempercepat proses alih teknologi dari pusat-pusat penelitian Perguruan Tinggi ke dunia industri dan sebaliknya; (3) Perguruan Tinggi dan dunia industri bekerjasama

dalam menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja; (4) pemerintah menyediakan bantuan dana bagi pengembangan program tertentu guna mempererat kerjasama perguruan tinggi dengan dunia industri; (5) membangun inkubator bisnis yang disubsidi dan berbasis di kampus, yang bertujuan memupuk dan mengem-bangkan industri baru di bidang tertentu yang didukung sepenuhnya oleh ahli-ahli yang berkompeten di perguruan tinggi; (6) membangun lembaga riset tangguh yang disubsidi dan berbasis di kampus, yang ditujukan untuk menarik pengusaha dan dunia industri agar bersedia memanfaatkan jasa yang disediakan perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

- Alhumami, Amich, 2004, *Pendidikan Tinggi dan pembangunan Ekonomi*, KOMPAS 6 Agustus 2004.
- BAPPENAS-UNDP, 2004, *The Economics of Democracy, Financing Human*
- BPS, 2003, *Survey Sosial Ekonomi Nasional*.
- Sekretariat Kelompok Kerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan BPS- BAPPENAS-Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2004, *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*.
- Tambunan, Friez R, 2004, *Pajak sosial Pendidikan, Mengapa Tidak?*, KOMPAS 5 Agustus 2004.
- The World Bank, 1988, *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery*
- The World Bank, 1999, *Education Sector Strategy*.
- UNDP, 1999, *Human Development Index Report*.
- Wicaksono, Teguh Yudo, 2004, *Besarkah Manfaat Pendidikan Tinggi Terhadap Pembangunan ekonomi?*, KOMPAS 21 Agustus 2004.